

ANALISIS PERKEMBANGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Laurensius Deo Aditya
2019111187

ABSTRAK

Akuntansi keuangan pemerintahan memerlukan suatu rencana yang matang untuk mencapai suatu tujuan tertentu sejalan dengan bagaimana akuntansi pemerintahan dilaksanakan di Indonesia. Otonomi daerah diartikan sebagai hak, kekuasaan, dan tanggung jawab daerah otonom untuk mengendalikan dan mengurus kegiatan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 5). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif untuk mengukur perkembangan kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Lampung Timur tahun anggaran 2020 hingga 2023. Penelitian ini menggunakan metode deskripsi dan skala pengukuran rasio keuangan daerah, diantaranya; rasio kemandirian, rasio desentralisasi fiskal, rasio indeks kemampuan rutin, rasio keserasian, rasio pertumbuhan dan rasio belanja langsung dan tidak langsung. Hasil dari pengukuran dan analisis dalam penelitian ini didapatkan secara berurutan dari tahun 2020 hingga 2022 sebagai berikut; rasio kemandirian masuk dalam kategori rendah sekali, rasio derajat desentralisasi fiskal; masuk dalam kategori sangat kurang. Rasio indeks kemampuan rutin masuk dalam kategori sangat kurang. Rasio keserasian masuk dalam kategori cukup efektif. Rasio pertumbuhan masuk dalam kategori sangat kurang. sedangkan untuk rasio belanja langsung dan tidak langsung masuk dalam kategori sangat kurang. secara keseluruhan kemampuan keuangan mengalami perkembangan. Namun masih masuk dalam kategori kurang. Dari semua analisis dapat diambil kesimpulan bahwa kemampuan keuangan daerah kabupaten Lampung Timur tahun anggaran 2020 hingga 2023 APBD belum mampu mendukung secara optimal jalannya otonomi daerah.

Kata kunci; **APBD, Rasio Keuangan Daerah, Lampung Timur, Otonomi Daerah**

**THE DEVELOPMENT ANALYSIS OF REGIONAL FINANCIAL CAPABILITY
FOR SUPPORTING THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL AUTONOMY
IN EAST LAMPUNG**

**Laurensius Deo Aditya
2019111187**

ABSTRACT

In keeping with the way government accounting is carried out in Indonesia, government financial accounting needs a well-thought-out plan to accomplish specific objectives. According to UU No. 32 of 2004 Article 1 Paragraph 5, regional autonomy is the right, authority, and duty of an autonomous area to oversee and administer local community interests and governmental operations in compliance with legislative requirements. This study uses quantitative methods to assess how East Lampung Regency's regional financial capability has developed during the 2020–2023 fiscal year. For regional financial ratios such as the independence ratio, fiscal decentralization ratio, routine capability index ratio, growth ratio, harmony ratio, and direct and indirect expenditure ratio, this study employs a description approach and a measuring scale. The following outcomes of the measurements and analysis conducted for this study were acquired in the order of 2020 to 2022: The independence ratio, which measures the extent of fiscal decentralization, is extremely low and belongs in the very poor group. Routine ability index ratio falls into the category of really poor. The compatibility ratio falls within the category of fairly effective. The growth ratio falls into the extreme poor range. In the meantime, the direct to indirect spending ratio falls into the extremely poor range. The general state of financial capacities has improved. It still falls into the poor group, though. Based on all the analyses, it can be said that the East Lampung district's financial capability for the 2020–2023 APBD budget year has not been able to optimally support the implementation of regional autonomy.

Keyword : APBD, Regional Financial Ratios, East Lampung, Regional Autonomy